ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Diajukan Oleh:

Yuni Kartika

4518013047

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
Nama	: Yuni Kartika
Stambuk/NIM	: 4518013047
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Tempat Penelitian	: Badan Keuangan Dan Asset Daerah

Telah Disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Firman Menne,SE.,M.Si,Ak,CA	**Thanwain Tala, S.E., M.Si**

Mengetahui dan Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa	**Ketua Program Studi Akuntansi**
Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, S.E., M.Si	**Thanwain Tala,S.E,.M.Si**

Tanggal penegsahan:……

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuni Kartika

NIM : 4518013047

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judulu: Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan penerapan asli dari saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar,18 Juni 2022

Mahasiswa yang bersangkutan

METERAI TEMPEL

A74AJX968536028

Yuni Kartika

Analysis Of Regional Revenue And Expenditure Budgets In The Regional Government Of Enrekang Regency

By
Yuni Kartika

Accounting Study Program, Faculty Of Economics And Business
Bosowa University

ABSTRACK

Yuni kartika.2022.skripsi. budget analysis of ragional revenus and expenditures in the district government of Enrekang (Has Been mentored byDr.Firman Menne,S.E,.M.Si.,Ak.,CA and Thanwai Tala,S.E.,M.Si) Bosowa University Faculty of Economics and Business Accounting Study Program.

The problem in this research are: (1) the budget is often made smaller than the potential revenue that may be obtained. This is done so that the realization of the budget revenues greater amount of budget revenue that has been created, as well as the budget is made larger than the realization of the potential that can be achieved. That resulted in inefficiency budget. (2) The users of financial statements mostly unable to understand the accounting and less able to understand and interpret the budget realization report, so it is necessary that financial performance analysis can be a tool to enable users of financial statements in understanding and interpreting the budget realization report.

The formulation of the problem in this research is : "how is the regional financial independence of Enrekang Regency?, how is the effectiveness of realizing the local revenue of Enrekang Regency?, how is the effiency of regional spending in enrekang regency?, how is the growth of regional original income ang gross regional domestic income of Enrekang Regency?

This study aims to budget analysis of ragional revenus and expenditures in the district government of Enrekang for the period 202`. By using the Independence ratio,effectiveness Ratio and Efficiency Ratio,share and growth.

Keywords : *Evaluation,Independence Ratio,Ratio Effectiveness and Efficiency Ratio,Share and Growth.*

Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Oleh:
Yuni Kartika

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bosowa

ABSTRAK

Yuni Kartika.2022.Skripsi Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang dibimbing oleh Bapak Dr.Firman Menne,S.E,.M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing I dan Thanwain Tala,S.E.M.Si selaku pembimbing II.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Anggaran seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin diperoleh. Hal ini dilakukan agar realisasi anggaran pendapatan lebih besar dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, serta anggaran yang dibuat lebih besar dari realisasi potensi yang dapat dicapai. Hal itu mengakibatkan inefisiensi anggaran. (2) pengguna laporan keuangan Sebagian besar belum memahami akuntansi dan kurang mampu memahami dan menginterprestasikan laporan realisasi anggaran, sehingga diperlukan analisis kinerja keuangan yang dapat menjadi alat untuk memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menginterprestasikan anggaran dan laporan realisasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang? 2. Bagaimana Efektivitas Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang? 3. Bagaimana Efisiensi Belanja Daerah Di Kabupaten Enrekang? 4. Bagaimana pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan domestic ragional bruto Kabupaten Enrekang?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Enrekang periode 2022. Dengan menggunakan Rasio Kemadirian, Rasio Efektvitas, Rasio Evisiensi Dan Share And Growth

Kata kunci : Rasio Kemadirian, Rasio Efektvitas, Rasio Evisiensi Dan Share And Growth

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat rahmat dan hodayah-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat beliau sehingga kita bisa menikmati bagaimana indahnya bernaung di bawah ajaran islam.

Alhamdulillah berkat hidayahnya dan pertolongan allah swt, penulis dapat menyelesaikan tugas dan penyusunan skripsi ini. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan namun karena keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan ditemukan kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi isi. Banyak tantangan dan rintangan yang penulis lalui dalam proses penyelesaian skrpsi. Ditambah lagi dengan adanya wabah covid-19 diseluruh dunia yang membuat segala aktivitas di luar dibatasi, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan.

Skripsi ini didedikasikan untuk insan yang teramat berarti dalam hidup penulis. Teruntuk kedua orang tua saya, bapak(basri) dan alm.mama (alm.hasmidar) serta kakak dan adik saya yakni Resti Ayu Wandira S,Kom dan Apriyani, alhamdulillah saudara saya telah sarjana lebih dahulu dan sudah mendaptkan pekerjaan dan adik saya yang masih duduk di bangku SMA. Suatu kesyukuran bagi kami hidup dalam keluarga yang mementingkan pendidikan. Saya selalu teringat akan sosok bapak yang sendiri-nya membiayai/menafkai kami bertiga setelah alm.mama meninggalkan kami sewaktu kami masih duduk di bangku SMP, bapak yang tidsak pernah lelah berjuang demi kami, meski kita tergolong keluarga yang kurang mampu tapi bapak selalu berpesan bahwa semua

ada jalan jika kita bersyukur menjelani sesuatu dengan ihklas. Dalam menulis skripsi ini penulis terharu mengingat kembali jasa-jasa dari bapak. Oleh Karena itu, tidak lengkap rasanya jika penulis tidak menulis dalam lembaran kata pengantar skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya skripsi ini:

1. Pertama tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof.Dr.Ir. Batara Surya,S.T.,M.Si.
2. Ibu Dr.HJ.Herminawati Abu Bakar SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Indrayani Nur, SE.,M.Si Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Thanwain Tala, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Thanwain Tala, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing,memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi yang dilakukan dengan penulis.
6. Seluruh dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilu dam pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah.
7. Beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
8. Terima kasih kepada bapak, alm.mama tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan kasih saying dan kesabaran hingga saat ini, serta doa dan dukungannya selama ini untuk keberhasilankunbisa dapat mengerjakan skripsi

ini dengan baik, semoga mereka bangga dengan apa yang sekarang saya peroleh.

9. Orang yang kusayangi keluarga dan saudara terima kasih telah mendukung,mendoakan,memberi semngat untuk terus maju sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Muhammad Irsyad sebagai partner special saya, terima kasih telah menjadi partner dalam segala hal yang baik,yang menemani meluangkan waktunya, mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberi semngat untuk terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
11. Kepada semua teman teman seperjuangan di Universitas Bosowa dan terkhusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih telah bersama sama melalui suka dan duka yang telah dilalui bersama-sama. Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Makassar, 13 Mei 2022

Penulis

Yuni kartika

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
ABSTRACK	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kerangka Teori	8
2.1.1 Kinerja Keuangan	8
2.1.2 Laporan Keuangan	17
2.2 Kerangka Pikir	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	29
3.3 Metode Pengumpulan Data	30
3.4 Metode Analisis Data	30
3.5 Definisi Operasional	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Enrekang	34
4.2 Hasil Penelitian	45
4.3 Pembahasan	51

BAB V PENUTUP 53
5.1 Kesimpulan 53
5.2 Saran 53
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 57

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1 Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran 17
3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah 31
3.2 Kriteria Efektifitas KInerja Keuangan..... 32
3.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 32
3.4 Laporan Keuangan 46

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1 Kerangka Pikir 29
3.1 Peta Kemampuan Keuangan Metode Kuadran *Growth* (%) 33
3.2 Struktur Organisasi..... 38
4.1 Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten Enrekang 51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah perencanaan keuangan tahunan oleh pemerintah daerah yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya. Wujudnya adalah APDB sebagai pedoman perencanaan kegiatan dalam satu periode keuangan. Dengan demikian APBD memegang peran penting karena suatu kegiatan pemerintah daerah tidak bisa dilaksanakan jika tidak tercantum dalam APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) merupakan suatu rencana kerja kuantitatif pemerintah yang dinyatakan dalam satuan moneter. Komponen APBD mencerminkan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah daralm rangka membiayai kegiatan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. APBD dapat dijadikan salah satu alat untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab (Haryani, 2016).

Proses penyusunan APBDharus benar-benar dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tetap memperhatikan potensi keanekaragaman sumber daya yang ada di daerah tersebut. Komponen APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Komponen pendapatan yang ada

di Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapaan Daerah yang Sah (Sinambela, 2016).

Selanjutnya, komponen belanja yang ada di dalam APBD terdiri dari: Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung. Belanja langsung terdiri dari Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Belanja Tak Langsung. diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal/Pembangunan. Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal.

Pembiayaan merupakan komponen APBD yang terakhir, pembiayaan adalah sumber - sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran (Suryantini, 2017). Menurut kelompok sumbernya, pembiayaan terdiri dari: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang (Ramadhani, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hak yang dimaksud dalam pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Risyanto, 2015). Pengelolaan pendapatan daerah sangat penting dilakukan agar dapat mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menganalisis belanja daerah, terdapat ketentuan bahwa belanja yang telah dianggarkan dengan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Belanja daerah dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah baik atau buruk. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik pabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang telah dianggarkan, begitu jug sebaliknya. Analisis varians juga dapat dilakukan untuk menilai apakah realisasi belanja daerah telah berjalan efektif dan efisien sesuai yang telah dianggarkan (Dahlena, 2020).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat oleh pemerintah, pembaca laporan dapat memperoleh informasi secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang dapat dinyatakan dengan nilai nominal atau besarnya persentasi perbedaan. bisa dinyatakannya dalam nilai nominalnya atau presentasenya (Hiariey, 2017).

Selisih anggaran belanja daerah dikategorikan dua jenis, yaitu: selisih disukai (*favourable variance*), dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). *Favourable variance* terjadi apabila realisasi belanja lebih kecil dari yang telah dianggarkan, sedangkan *unfavourable variance* terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari yang telah dianggarkan. Dalam menganalisis varians belanja daerah terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhtikan, antara lain: mengapa terjadi varanians, apakah varians yang terjadi cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan? Berapa besarnya nilai varins, apakah jumlahnya signifikan, berapa tingkat varians yang bisa ditoleransi, dan lain sebagainya (Kaeng & Saerang, 2017).

Keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keungan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka terwujudnya tujuan desentralisasi. Menurut UU No.17 Tahun 2003, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (1) hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakn urusan pemerintahan daerah; (3) penerimaan dan pengeluaran daerah; (4) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain; dan (5) kekayaan pihak lain

yang dikuasai oleh pemerintah daerah dlam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Kabupaten Enrekang sebagai salah satu daerah berkembang di Sulawesi Selatan terus berupaya melakukan pembangunan untuk mencapai daerah yang maju, aman, dan sejahtera melalui keuangan daerah yang transfaran yang akuntabel. Namun demikian masalah yang seringkali dihadapi pemerintah Kabupaten Enrekang yaitu anggaran seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin dapat diperoleh. Hal ini dilakukan agar realisasi anggaran pendapatan lebih besar jumlanya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, serta anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi yang dapat dicapai. Hal ini berakibat terjadi inefisiensi anggaran. Selain itu, para pengguna laporan keuangan kebanyakan tidak mampu memahami akuntansi dan kurang dapat memahami serta mengintepretasikan laporan realisasi anggaran, sehingga perlu analisis kinerja keuangan yang dapat menjadi alat bantu untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam memahami dan mengintepretasikan laporan realisasi anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini penulis ingin menganalisis APBD Kabupaten Enrekang, baik dari tingkat kemandirian keuangan, efektifitas, efisiensi maupun *share and growth*-nya. Dengan demikian maka judul yang diajukan adalah: **"Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang."**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemandirian keuangan daerah Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana efektifitas merealisasikan PAD Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana efisiensi belanja daerah Kabupaten Enrekang?
4. Bagaimana pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui efektifitas merealisasikan PAD Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengetahui efisiensi belanja daerah Kabupaten Enrekang.
4. Untuk mengetahui pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Enrekang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan keilmuah terutama dalam topik analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan guna membantu pihak pemerintah daerah dalam menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Bagi Peneliti Lain

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bahan referensi tentang analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan

1. Pengertian Keuangan

Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibatdalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah (Sundjaja dan Barlian, 2002).

2. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan (Jumingan, 2014). Kinerja Keuangan adalah realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual (Darise, 2015). Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posis keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Berdasarkan definisi kinerja keuangan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan

pada periode tertentu yang diukur dengan beberapa indikator dan disusun berdasarkan basis akrual.

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2016). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 108/2000, pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

1) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

   DPRD adalah badan yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah.

2) Badan Eksekutif

   Badan eksekutif merupakan badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pemimpin unit Pemerintahan Daerah lainnya.

3) Badan Pengawas Keuangan

   Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jendral, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan badan Pemerikasa Keuangan.

4) Investor, Kreditor, dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

5) Analisi Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah

Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti dan lain-lain.

6) Rakyat

Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan Daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah salah satu ukuran yang dihasilkan dari kegiatan atau program sehubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat kemampuan daerah.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Akuntabilitas menunjukkan bagaimana uang publik

dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggung jawaban berperan penting untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi bebagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat Pemerintah Daerah untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Tidak hanya itu pengukuran kinerja juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan – pelayan tersebut.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk mambantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantupemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatakn efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Yasudi, 2016).

4. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009) dalam Yasudi (2016), antara lain adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congcruence*.
d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan koletif yang rasional.

Berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan mengandung beberapa tujuan (Jumingan, 2014):

(1) Mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
(2) Mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja keuangan yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset yang dimiliki. Pengukuran kinerja keuangan juga mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan suatu

instansi, serta mengevaluasi kinerja keuangan dan menetapkan tujuan kinerja masa datang

5. Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat sistem pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009) dalam Yasudi (2016), antara lain:

1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja dan membandingkan dengan target kinerja sertya melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward* & *punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasiyang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
5) Sebagai alat komunikasi antara bahawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
7) Membantu memahami proses kegiatan instasi pemerintah; dan
8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

6. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2016), menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2011), derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan

Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

c. Rasio Efektivitas

Halim (2016), menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

d. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil Rasio Efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

e. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Halim, 2016).

f. Perhitungan dan Analisis *Share* dan *Growth*

Diawali dengan perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *Share* dan *Growth* kemudian mengklasifikasikan dengan Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran. Share merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah.

Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Share dapat dihitung dengan cara membandingkan antar PAD yang terealisasi dengan total belanja daerah. Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

g. Pemetaan dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran

Yang dimaksud metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *growth* dan *share*. Dengan nilai *growth* dan *share* maka masing-masing provinsi dapat diketahui posisinya (pada kuadran berapa). *Share* merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total belanja. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah, yaitu dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. *Growth* merupakan angka

pertumbuhan PAD pada tahun i dari tahun i-1. Rasio ini digunakan untuk melihat pertumbuhan PAD setiap tahunnya.

Tabel 2.1
Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam Total Belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai *share* dan *growth* yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pegembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber: Bappenas (2003) dalam Yasudi (2016)

2.1.2 Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan data atau aktivitas perusahaan (Munawir, 2014).

Laporan keuangan sektor publik meliputi (Mahmudi, 2011) yaitu:

1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);
2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
3) Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LK-K/L); dan

4) Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD).

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah meliputi:

1) Laporan Posisi Ke uangan (Neraca);
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
4) Laporan Operasional;
5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6) Laporan Arus Kas; dan
7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berguna untuk (*Government Accounting Standard Board* (GASB, 1998):

1) Membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel terhadap publik.
2) Membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting.

Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Laporan keuangan yang disampaikan setidaknya meliputi:

1) Laporan Realisasi APBD

Laporan ini menyajikan informasi perbandingan antara realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap fungsi, organisasi dan jenis selama satu tahun anggaran.

2) Neraca

Neraca menyajikan informasi posisi keuangan pemda mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran.

3) Laporan Arus Kas

Laporan ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemda selama satu tahun anggaran.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi APBD, neraca, dan laporan arus kas.

Laporan keuangan merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menunjukan transparansi dan akuntabilitas. Terdapat dua alasan mengapa pemerintah perlu mempublikasikan laporan keuangan yaitu (Mahmudi, 2011):

1) Laporan keuangan merupakan alat pengendalian manajemen dan evalusi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya.

2) Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal, yaitu kepada pihak–pihak di dalam organisasi, misalnya atasan, pegawai, dan pemeriksa maupun pertnggung jawaban eksternal. Kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, misalnya masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

2. Peranan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun dengan tujuan memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan beberapa hal seperti: realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-undangan. Suatu entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian targetnya serta seberapakah hasil yang telah dicapai oleh entitas pada suatu periode pelaporan keuangan yang bertujuan untuk beberapa kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.

4) Keseimbangan Antar –generasi

Membantu mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

3. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah (Mahmudi, 2011):

1) Memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang digunakan untuk pertimbangan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
2) Menunjukan transparansi dan akuntabilitas publik.
3) Memberikan informasi untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Tujuan pelaporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari standar akuntasnsi pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan

pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik dalam ekonomi, sosial, maupun politik dengan (Mahmudi, 2011):

1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai.
4) Menyediakan informi menganai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatanya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, akibat dari kegiatan dilakukan selama periode pelaporan.

4. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (Halim, 2016). Pendapatan Daerah digolongkan menjadi tiga, yaitu (Darise, 2015):

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintahan daerah berdasarkan peraturan daerah dengan sumber-sumber pemungutan terdiri dari:

1) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari: Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4) Lain–lain Pendapatan Asli Daerah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari:

1) Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Dana bagi hasil bersumber dari pajak yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil sumber daya alam yaitu: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
2) Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU suatu daerah dapat ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.
3) Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar.

c. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Mencakup: hibah/bantuan dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penang-gulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari teknis kepada kabupaten/kota, dana penyesuaiaan, bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.

5. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda (Darise, 2015). Belanja Daerah terdiri dari:

1) Belanja Aparatur Daerah, yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.
2) Belanja Pelayanan Publik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum; dan
3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan

DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 66 ayat 3, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Otorisasi.

   Artinya bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan.

   Artinya bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi menajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan.

   Artinya bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelanggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi.

   Artinya bahwa angaran daerah untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

7. Analisis Keuangan Pada APBD

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan (Halim, 2016). Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk:

1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2) Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
4) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.2 Kerangka Pikir

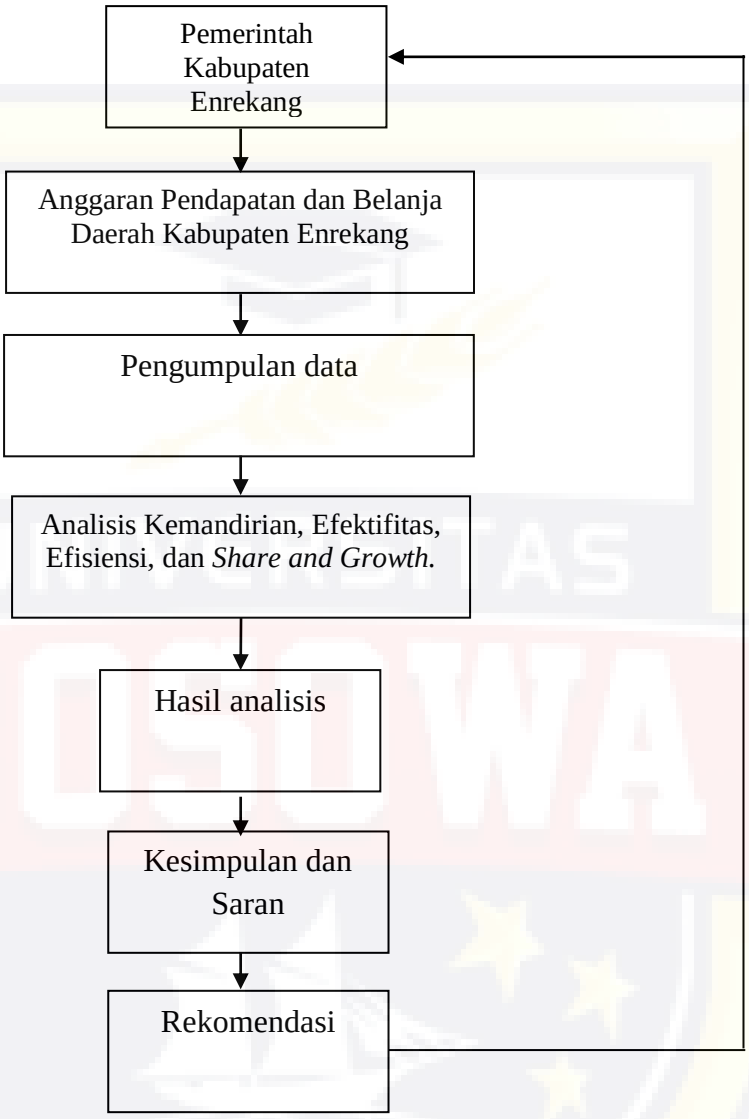

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang. Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan terhitung bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2022.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

1. **Data Kuantitatif**

   Data kuantitatif adalah data yang bentuk angka, seperti tabulasi isian kuisioner dan data laporan keuangan pemerintah daerah.

2. **Data Kualitatif**

   Data kualitatif adalah data yang tidak dalam bentuk angka, seperti profil pemerintah daerah.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berisikan informasi dan teori – teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi atas laporan keungan pemerintah daerah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan meminta laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang pada instansi terkait.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemapuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerahnya. Rumusan rasio kemandirian daerah, yaitu (Halim, 2016):

$$\textbf{Rasio Kemandirian} = \frac{\textbf{PAD}}{\textbf{Total Penerimaan Daerah}} \textbf{x } 100\%$$

Tabel 3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2016

Pola Hubungan Instruktif, Peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pola Hubungan Konsultatif, Dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi. Pola Hubungan Partisipatif, Peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Pola Hubungan Delegatif, Campur tangan pemerintah pusat sudah

tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3.4.2 Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Rumusan rasio efektivitas, yaitu (Halim, 2016):

$$\textbf{Rasio Efektifitas} = \frac{\textbf{Realisasi Penerimaan PAD}}{\textbf{Target Penerimaan PAD}} \textbf{x 100\%}$$

Tabel 3.2 Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Halim, 2016

3.4.3 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah. Rasio efisiensi diukur dengan:

$$\textbf{Rasio Efisiensi} = \frac{\textbf{Realisasi Belanja Daerah}}{\textbf{Realisasi Pendapatan Daerah}} \textbf{x 100\%}$$

Tabel 3.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Tidak efisien
90 – 100	Kurang efisien
80 – 90	Cukup efisien
60 – 80	Efisien
<60	Sangat efisien

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

3.4.4 Share *and Growth*

Adapun elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Sedangkan share merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. dan growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dari tahun i-1.

$$\boldsymbol{Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \text{ x } 100\%}$$

$$\boldsymbol{Growth = \frac{PAD_i - PAD_{i-1}}{PAD_{i-1}} \text{ x } 100\%}$$

Keterangan:

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah periode i-1

Gambar 3.1 Peta Kemampuan Keuangan Metode Kuadran *Growth* (%)

Sumber: Habibur Rahman 2016

Pemetaan dan analisis kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran, yang dimaksud metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *growth* dan *share*. Dengan nilai *growth* dan *share* maka dapat diketahui posisinya (pada kuadran berapa).

3.5 Definisi Operasional

1. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
3. Belanja daerah, adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya.
4. Pendapatan, adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Sejarah abad XIV, daerah ini disebut *Massenrempulu* yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari *endeg* yang artinya naik dari atau panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Endekan. Masih ada versi lain yang mengatakan bahwa administrasi pemerintahan telah dikenal dengan nama Enrekang versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung menyambung mengambil 85% dari seluruh luas wilayah 1.786.01 Km. Pada mulanya terbentuk Kabupaten Enrekang yang telah mengalami beberapa kali pergantian Bupati.

Sebelum terbentuknya menjadi Kabupaten berturut-turut mengalami perubahan bentuk. Pertama menurut sejarah pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama Malepong Bulan, kemudian yang terdiri dari 7 kawasan yang lebih dikenal dengan *Pitu Massenrempulu* yaitu: Endekan, Kassa, Batu Lappa, Duri, Maiwa, dan Baringin. Tujuh *Massenrempulu* ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV dan kerajaan tersebut berubah menjadi lima Massenrempulu yakni: Endekan, Duri, Maiwa, Kassa, dan Batu Lappa.

Kedua, zaman penjajahan sejak tahun 1012 sampai dengan 1941 berubah kembali menjadi dikepalai oleh seorang kontrolurel (Tuan Petoro).

Ketiga dalam zaman pendudukan Jepang (1941-1945) Oder Afreling Enrekang berubah nama menjadi Kanrikan. Keempat dalamu zaman Nica (NIT 1946 - 27 Desember 1949) kembali kawasan Mansenrempulu berubah menjadi *Onder Afdeling Enrekang*. Kelima kemujian sejak tanggal 27 Desember 1960, kawasan Massenrempulu berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan puncak pimpinan pemerintah disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang. Sehubungan ditetapkannya perda nomor: 4, 5 , 6 dan 7 tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang pembentukan 4 (empat) Kecamatan definitif dan perda nomor 5 dan 6 tahun 2006 tentang pembentukan 2 kecamatan sehingga pada saat ini Enrekang telah memiliki 11 kecamatan yaitu:

1) Kecamatan Enrekang ibu kotanya Enrekang;
2) Kecamatan Maiwa ibu kotanya Maroangin;
3) Kecamatan Anggeraja ibu kotanya Cakke;
4) Kecamatan Baraka ibu kotanya Baraka;
5) Kecamatan Alla' ibu kotanya Belajen;
6) Kecamatan Curio ibu kotanya Curio;
7) Kecamatan Bungin ibu kotanya Bungin;
8) Kecamatan Malua ibu kotanya Malua;
9) Kecamatan Cendana ibu kotanya Cendana;
10) Kecamatan Buntu batu ibu kotanya Pasui (hasil pemekaran dari Kecamatan Baraka diresmikan pada tanggal 19 januari 2007); dan

11) Kecamatan Masalle ibu kotanya Lo'ko hasil pemekaran dari Kecamatan Alla.

4.1.2 Struktur Bagan Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang

A. Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi yang merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Adapun Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang adalah

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparansi dan akuntabel. Untuk gerakan membangun enrekang maju, aman dan sejahtera"

b. Misi

Misi sesuai dengan tugas pokok dengan memperhatikan masukan pihak–pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi, oleh karena itu Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang adalah:

1. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki

2. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar penatausahaan pengelolaan keuangan dan asset daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel

B. Struktur Organisasi

Gambar 3.2 Struktur Organisasi

Sumber : Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang,2020

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pejabat structural Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Karja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

1) Kepala Badan
2) Sekretaris

   Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua undur dalam lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah.

   a. Sub Bagian Perencanaan : Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan perencanaan, pengendalian data, pembinaan evaluasi program / kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
   b. Sub Bagian Keuangan : Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Bidang Perencanaan Anggaran

Bidang Perencanaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis di Bidang Perencanaan Anggaran. Adapun pembagian kepala sub bidang pada Bidang Anggaran yaitu :

a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran I
b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran II
c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran III

4) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi kebijakan teknis Bidang Pengelolaan kas, belanja tidak langsung dan pembiayaan dan belanja modal. Adapun pembagian kepala sub bidang pada Bidang Perbendaharaan yaitu :

a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kasda
b. Kepala Sub Bidang Belanja Operasi

c. Kepala Sub Bidang Belanja Modal

5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Adapun pembagian kepala sub bidang pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yaitu :

a. Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan : Subbidang Akuntansi Penerimaan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam melaksanakan tugas lingkup Subbidang Akuntansi Penerimaan.
b. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran : Subbidang Akuntansi Pengeluaran dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam lingkup Subbidang Akuntansi Pengeluaran.
c. Kepala Sub Bidang Konsolidasi dan Pelaporan : Subbidang Konsolidasi dan Pelaporan dipimpin oleh Subbidang, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi kebijakan teknis Bidang Konsolidasi dan Pelaporan.

6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan

bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun pembagian kepala sub bidang pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu :

a. Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan Barang Milik Daerah
b. Kepala Sub Bidang Analisi Pemanfaatan, Pengawasan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
c. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan

4.1.3 Kondisi Geografis dan Iklim Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3° 14° “36” LS dan 119° 40° “53” BT. Sedangkan ketinggian bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan Makassar ke kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 km. Batas-batas daerah Kabupaten sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Enrekang tahun 1024/2015 dalam seksi integrasi pengelolaan dan diseminasi statistik (2015), luas wilayah Kuabupaten Enrekang ini adalah 1.786,01 km atau sebesar 2,83% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Enrekang memiliki iklim tropis. Enrekang adalah kota dengan curah hujan yang signifikan bahkan dibulan terkering terdapat banyak hujan. Iklim ini dia anggap menjadi Af menurut klasifikasi iklim Koppen-Geiger. Suhu rata-rata

tahunan adalah 26.6^{o}C di Enrekang. Presipitasi rata-rata 2410 mm. Bulan terkering adalah Agustus dengan 138 mm curah hujan hampir semua presitipasi di sini jatuh pada Januari rata-rata 316 mm. Suhu terhangat sepanjang tahun adalah Oktober dengan suhu rata-rata 27.2 ^{o}C. Juli adalah bulan terdingin dengan suhu rata-rata 25.7^{o}C.

4.1.4 Topografi, Geologi dan Hidrologi Kabupaten Enrekang

Topografi wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya bervariasi berupa perbukitan, pengunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan wilayah didominasi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan datara hanya 15,04%.

4.1.5 Demografi Kabupaten Enrekang

Secara total jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2003 sebanyak 178.658 jiwa terdiri dari jenis kelamin laki-laki 90.341 dan perempuan 88.317 jiwa. Populasi penduduk Alla (40.403 jiwa), kemudian Kecamatan Baraka (31.305), Kecamatan Enrekang (28.467 jiwa) dan Kecamatan Maiwa (21.975 jiwa). Sedangkan jumlah angkatan kerja berdasarkan lapangan usaha secara total pada tahun 2002 berjumlah 75.244 dan pada tahun 2003 berjumlah 833.058 dan terbanyak pada sektor pertanian yaitu pada tahun 2002 (80,84%) dan tahun 2014 (83,73%). Selama periode 1998-2003 perekonomian Kabupaten Enrekang relatif selalu lebih baik bila dibandingkan dengan perekonomian Sulawesi Selatan. Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang sekitar 4,90%. Demikian pada tahun 2003 Kabupaten Enrekang tumbuh sekitar 5,71% dan Sulawesi Selatan tumbuh sekitar 5,39%.

4.1.6 Pendidikan Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu Kabupaten yang sangat memperhatikan sistem pendidikannya. Pemda Kabupaten Enrekang fokus meningkatkan kompetensi guru, dengan pendidikan yang maksimal ke anak didik. Tak tanggung-tanggung demi meningkatkan kompetensi guru tersebut, kadisdikbud Enrekang Jumurdin menambahkan, tahun ini menyiapkan 1 milliar. Sebanyak 27 perwakilan sekolah tingkat SD, SMP, dan SMU sederajat menerima surat keputusan Bupati Enrekang tentang penetapan sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Enrekang tahun 2017. Jumlah keseluruhan sekolah di Kabupaten Enrekang yaitu SD sebanyak 218 sekolah, SMP sebanyak 45 sekolah, dan SMA sebanyak 36 sekolah. Sistem wajib belajar 9 tahun.

4.1.7 Mata Pencaharian Masyarakat Kabupaten Enrekang

Pada umumnya penduduk Kabupaten Enrekang bermata pencaharian petani. Sektor pertanian sangat penting peranannya dalam perekonomian di Kabupaten Enrekang. Sektor pertanian memberi kontribusi yang paling besar terhadap PDRB. Sejak tahun 1998 sampai tahun 2002, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB diatas 47%. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian sebagian besar penduduk di wilayah ini masih mengandalkan sektor pertaninan. Selain sektor pertanian sektor kehutanan dan perkebunan juga memberikan kotribusi yang cukup besar. Luasannya hutan di Kabupaten Enrekang cukup luas dan tersebar di beberapa Kecamatan. Bila dirinci menurut jenisnya/fungsinya, maka dapat dikatakan sebagian besar hutan tersebut berupa hutan lindung (72.755) dan sebagian lainnya merupakan hutan produksi biasa (14.597). pada

tahun 2002 di kaluasan hutan produksi tersebut diperoleh produksi jati rimba sebanyak 4.048,66 m2 dan rotan sebanyak 478 ton.

Pertambangan termasuk juga mata pencaharian Kabupaten Enrekang berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Kabupaten Enrekang dapat diketahui potensi bahan galian ynag terbesar di berbagai Kecamatan. Bahan galian tersebut diantaranya minyak bumi, batubara, emas, perak, logam dasar (Cu, Pb, Zn) marmer, pasir, kuarsa, koalin, dan lain-lain. Semua sumberdaya tersebut sudah diketahui penyebarannya, namun baru sebagian bahan galian yang teridentifikasi jumlah cadangan di setiap wilayah. Karena daerah Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit yang terhampas luas sehingga memiliki sumberdaya alam yang salah satu Kabupaten terkaya di Sulawesi Selatan.

4.1.8 Social, Budaya dan Keagamaan Kabupaten Enrekang

Kehidupan sosial Kabupaten Enrekang yaitu bentuk kekeluargaan dan gortong royong yang tinggi menjadi keseharian sifat orang Duri. Dahulu mereka mengenal adanya status sosial dari kaum bangsawan, rakyat biasa dan budak. Namun segala kasta sosial itu sudah mereka hapuskan. Status sosial yang dianut oleh mereka kini berdasarkan pendidikan dan kekayaan yang dimiliki. Kebangasawanan sudah tidak berlaku lagi untuk mereka. Etnis dalam Kabupaten Enrekang didominasi oleh suku Duri yang berbatasan dengan Tana Toraja. Permukiman orang Duri berada di Kecamatan Baraka, Anggeraja dan Alla yang terdiri 17 desa. Suku Enrekang dan suku Maroangin (Marowangin) merupakan koalisi dari suku Duri yang bergabung dalam satu kesatuan yang disebut sebagai

suku Massenrempulu. Meskipun secara ras dan bahasa Duri cenderug dekat dengan suku Toraja.

Bahasa Duri mirip dengan bahasa Toraja, oleh karena itu suku Duri sering dianggap bagian dari suku Toraja. Meskipun memiliki kekerabatan dekat dengan Toraja, suku Duri banyak terpengaruh adat istiadat suku Bugis. Sehingga kadang-kadang juga orang Duri dianggap sebagian sub-suku dari suku Bugis. Islam menjadi agama yang dominan bagi sebagian suku Duri. Alu' Tojolo menjadi agama kepercayaan tradisional mereka sebelum Islam masuk ke suku Duri. Namun sebagian masyarakat Kabupaten Enrekang ada yang beragama Kristen karena pengaruh perbatasan dari Toraja dan Kabupaten lain.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Laporan Keuangan

Tabel 4.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp 99.783.896.842**
4.1.01	Pajak daerah	Rp 14.659.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp 31.505.101.736
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 18.741.119.760
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp 34.878.675.346
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**Rp 948.742.195.866**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 905.193.709.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 43.548.486.866
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**Rp 43.800.000.000**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp 43.800.000.000
	jumlah pendapatan	**Rp 1.092.326.092.708**

5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp 766.755.779.671**
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 448.260.180.979
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 289.931.921.331
5.1.03	Belanja Bunga	Rp 5.476.275.000
5.1.05	Belanja Hibah	Rp 21.407.902.361
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.679.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp 642.031.227.699**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp 1.590.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 78.593.807.776
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 173.037.329.776
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan,dan Irigasi	Rp 387.382.720.147
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 1.427.370.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**Rp 3.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp 3.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**Rp 173.867.176.569**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp 4.616.440.269
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 169.250.736.300
	jumlah belanja	**Rp 1.585.668.022.249**
	total surplus/(defisit)	**Rp - 493.341.929.541**

4.2.2 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemapuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerahnya. Berikut akan dilakukan perhitungan rasio kemandirian Kabupaten Enrekang untuk APBD Tahun Anggaran 2021.

$$\textbf{Rasio Kemandirian} = \frac{\textbf{PAD}}{\textbf{Total Penerimaan Daerah}} \textbf{x } 100\%$$

$$\textbf{Rasio Kemandirian} = \frac{99.783.896.842}{1.092.326.092.708} \textbf{x } 100\%$$

$$\textbf{Rasio Kemandirian} = 9,13\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandiran di atas diketahui bahwa PAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp99.783.896.842,- dan total penerimaan daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.092.326.092.708,-. Dengan demikian maka rasio kemandirian Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar 9,13%. Nilai tersebut tergolong dalam kemampuan keuangan "rendah sekali" karena berada pada 0% – 25%. Hal ini berarti pola hubungan Kabuapten Daerah sebegai pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat adalah pola hubungan "instruktif", di mana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

4.2.3 Efektivitas Merealisasikan PAD Kabupaten Enrekang

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Berikut akan dilakukan perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Enrekang untuk APBD Tahun Anggaran 2021.

$$\textbf{Rasio Efektivitas} = \frac{\textbf{Realisasi Penerimaan PAD}}{\textbf{Target Penerimaan PAD}} \textbf{x } 100\%$$

$$\textbf{Rasio Efektivitas} = \frac{99.783.896.842}{118.959.749.845} \textbf{x } 100\%$$

$$\textbf{Rasio Efektivitas} = 83,88\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan PAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp99.783.896.842,- dan target penerimaan PAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp118.959.749.845,-. Dengan demikian maka rasio efektivitas Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar 83,88%.

Nilai tersebut tergolong dalam kriteria “cukup efektif” karena berada di antara 80% - 90%.

4.2.4 Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Enrekang

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah. Berikut akan dilakukan perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Enrekang untuk APBD Tahun Anggaran 2021.

$$\textbf{Rasio Efisiensi} = \frac{\textbf{Realisasi Belanja Daerah}}{\textbf{Realisasi Pendapatan Daerah}} \textbf{x } 100\%$$

$$\textbf{Rasio Efisiensi} = \frac{1.585.668.022.249}{1.092.326.092.708} \textbf{x } 100\%$$

$$\textbf{Rasio Efisiensi} = 145,16\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di atas diketahui bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.585.668.022.249,- dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.092.326.092.708,-. Dengan demikian maka rasio efisiensi Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar 145,16%. Nilai tersebut tergolong dalam kriteria “tidak efisien” karena berada >100%.

4.2.5 Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Enrekang

Diawali dengan perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *Share* dan *Growth* kemudian mengklasifikasikan dengan Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran. *Share* merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur

seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Share dapat dihitung dengan cara membandingkan antar PAD yang terealisasi dengan total belanja daerah.

$$\boldsymbol{Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \text{ x } 100\%}$$

$$\boldsymbol{Share = \frac{99.783.896.842}{1.585.668.022.249} \text{ x } 100\%}$$

$$\boldsymbol{Share = 6,29\%}$$

Berdasarkan perhitungan rasio *share* di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan PAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp99.783.896.842,- dan total belanja Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.585.668.022.249,-. Dengan demikian maka rasio *share* Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar 6,29%. Nilai tersebut tergolong “rendah”.

Sementara rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\boldsymbol{Growth = \frac{PAD_i - PAD_{i-1}}{PAD_{i-1}} \text{ x } 100\%}$$

$$\boldsymbol{Growth = \frac{99.783.896.842 - 134.733.760.140}{134.733.760.140} \text{ x } 100\%}$$

$$\boldsymbol{Growth = -25,94\%}$$

Berdasarkan perhitungan rasio *growth* di atas diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp99.783.896.842,- dan PAD Kabupaten Enrekang tahun anggaran sebelumnya, tahun 2020, adalah sebesar Rp134.733.760.140,-. Dengan demikian maka rasio *growth* Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 adalah sebesar –25,94%. Nilai tersebut tergolong "rendah", dengan kata lain, PAD Kabupaten Enrekang mengalami penurunan sebesar 25,94%.

Berdasarkan analisis *share and growth* diketahui bahwa nilai *share* maupun *growth* Kabupaten Enrekang pada tahun anggaran 2021 berada dalam kategori "rendah". Dengan demikian maka kemampuan keuangan Kabupaten Enrekang berada pada kuadran IV.

Gambar 4.1 Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten Enrekang

Kuadran II ***Share*: Rendah** ***Growth*: Tinggi**	**Kuadran I** ***Share*: Tinggi** ***Growth*: Tinggi**
Kuadran IV ***Share*: Rendah** ***Growth*: Rendah**	**Kuadran III** ***Share*: Tinggi** ***Growth*: Rendah**

Sumber: Habibur Rahman 2016

Kondisi kemampuan keuangan Kabupaten Enrekang berada pada posisi yang buruk karena peran PAD belum begitu besar dalam belanja daerah. Sementar itu daerah belum mampu menggenjot pendapatan asli daerahnya secara optimal.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat presentase rasio kemandirian Kabupaten Enrekang masih rendah sekali. Hal ini menunjukkan pola hubungan pemerintah daerah dan pusat dalam pola hubungan instuktif., di mana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Pola instruktif tersebut yang membuat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Hal itu diperkuat dengan pendapatan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Enrekang yang mencapai Rp948.742.195.866,- atau 86,9% dari total penerimaan daerah Kabupaten Enrekang. Rasio kemandirian yang rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah yaitu rendahnya pajak/retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah pendapatan asli daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sedangkan umtuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam pemungutannya berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima dalam bentuk dana perimbangan.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat presentase rasio efektivitas Kabupaten Enrekang berada dalam kategori “cukup efektif”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang belum cukup maksimal dalam mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan asli daerah. Pada sisi yang

lain, pemerintah Kabupaten Enrekang tidak mencari sumber – sumber pendapatan asli daerah yang lainnya yang sah.

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat presentase rasio efisiensi Kabupaten Enrekang berada dalam kategori "tidak efisien". Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang tidak efisien dalam mengelola keuangan daerah karena belanja daerah jauh melebihi pendapatannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja tidak langsung dibanding belanja tidak langsung. Semestinya belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Dan pos belanja yang paling besar adalah belanja pegawai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Rasio kemandiran Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 tergolong dalam kategori “rendah sekali”.
2. Rasio efektivitas Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 tergolong dalam kriteria “cukup efektif”.
3. Rasio efisiensi Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 tergolong dalam kritieria “tidak efisien”.
4. Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Enrekang memperoleh hasil bahwa analisis *share* dan *growth* yang rendah. Sehingga Kabupaten Enrekang berada dalam kuadran IV, di mana kemampuan keuangan Kabupaten Enrekang berada pada posisi yang buruk karena peran PAD belum begitu besar dalam belanja daerah. Sementar itu daerah belum mampu menggenjot pendapatan asli daerahnya secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Enrekang seharusnya mengurangi tingkat ketergantungan daerah, terutama untuk bantuan dari pemerintah pusat dengan cara lebih

2. Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu meningkatkan pengelolaan terhadap potensi daerah karena tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Enrekang lebih memprioritaskan pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja langsung sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyrakat.
4. Peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian sejenis dengan lokasi yang berbeda guna hasil penelitian dapat dilegalisir. Selain itu, Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi komparasi dengan membandingkan analisis kinerja APBD pada dua daerah atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlena, Murni. 2020. *Analisis Angagran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.* Costing: Journal of Economics, Business and Accounting. Vol. 3, No. 2, Juni 2020.

Darise, Nurlan. 2015. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: PT Indeks.

Governmental Accounting Standard Board, 1998, *Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB, Norwalk, Conn.

Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Public*. Jakarta: Salemba Empat.

Haryani. 2016. *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bireun*. Jurnal Kebangsaan. 5(9).

Hiariey, C. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Ambon*.Repository Sarjana FEB Universitas Gajayana Malang.

Jumingan. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kaeng, A., R., & Saerang, D., P. 2017. *Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(2).

Munawir. 2014. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty

Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Ramadhani, dan Randria, F. 2016. *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010 – 2015*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 14(1).

Risyanto, H. 2015. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Angaran 2004 – 2013*. Coopetition. 6(1)

Sinambela, E. 2016. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. 16(1).

Suryantini, N., P. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Prosiding Seminar Nasional AIMI.

Sundjaja, Ridwan dan Barlian, Inge. 2002. *Manajemen Keuangan Satu*, Edisi ke Empat, Jakarta: Literata Lintas Media.

Yasudi, Anom Rubit. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Rasio Dan Share Growth Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Enrekang (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Enrekang)*. Skripsi. Universitas Haluoleo, Kendari

LAMPIRAN

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**99.783.896.842**
4.1.01	Pajak Daerah	14.659.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	31.505.101.736
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.741.119.760
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	34.878.675.346
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**948.742.195.866**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	905.193.709.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.548.486.866
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**43.800.000.000**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	43.800.000.000
	Jumlah Pendapatan	**1.092.326.092.708**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**766.755.779.671**
5.1.01	Belanja Pegawai	448.260.180.979
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.931.921.331
5.1.03	Belanja Bunga	5.476.275.000
5.1.05	Belanja Hibah	21.407.902.361
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.679.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**642.031.227.699**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.590.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.593.807.776
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.037.329.776
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	387.382.720.147
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.427.370.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**173.867.176.569**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.616.440.269
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	169.250.736.300
	Jumlah Belanja	**1.585.668.022.249**
	Total Surplus/(Defisit)	**(493.341.929.541)**